

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan jaman pada saat ini menjadikan kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Banyaknya tingkat kebutuhan masyarakat yang harus melakukan pinjaman pada lembaga keuangan demi memenuhi kebutuhan. Masyarakat pada umumnya juga banyak yang memilih melakukan pinjaman pada sebuah badan usaha simpan pinjam yaitu koperasi simpan pinjam ataupun koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam.

Koperasi berorientasi khususnya pada pemenuhan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya, koperasi didirikan berlandaskan kepada pemikiran bahwa melalui kerja sama maka aktivitas ekonomi dapat ditata dan diarahkan demi kepentingan bersama dan meraih kesejahteraan secara bersama pula. Seperti halnya yang tertuang Menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Dari Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang telah di sebutkan di atas, dapat di pahami bahwa koperasi memegang peranan yang penting dalam membantu mendorong perkonomian bangsa. Selain itu, dalam praktiknya di lapangan koperasi memiliki fungsi dan peran yang

berbeda dengan perusahaan swasta maupun BUMN, karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya melalui pelayanan yang diberikan koperasi kepada anggota.

Dalam peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/PER/M.KUKM/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi sektor riil sebagai pedoman Piutang Usaha adalah tagihan koperasi sebagai akibat penyerahan barang/jasa kepada pihak lain yang tidak dibayar secara tunai. Pengakuan dan pengukuran (perlakuan) transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai perolehan piutang. Penyajian disajikan pada pos aset lancar sebesar nilai bersih piutang, yaitu nilai saldo piutang usaha dikurangi dengan taksiran kemungkinan tidak tertagihnya piutang (cadangan kerugian piutang). Pengungkapan rincian piutang usaha dan menjelaskan piutang yang terjadi dengan anggota dan dengan non anggota.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 13/PER/M.KUKM/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam sebagai pedoman Penyisihan Pinjaman Tak Tertagih adalah penyisihan nilai tertentu, sebagai “pengurangan nilai nominal” piutang pinjaman atas terjadinya kemungkinan risiko pinjaman tak tertagih, yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian akibat pemberian pinjaman sesuai karakteristik masing-masing usaha yang dibiayai. Pengakuan dan pengukuran (perlakuan) Koperasi dapat membentuk pos penyisihan kerugian akibat pemberian pinjaman, yang nilainya disesuaikan dengan

perkiraan pinjaman tak tertagih setiap periode sesuai karakteristik masing-masing usaha yang dibiayai. Penyajian saldo penyisihan pinjaman tak tertagih disajikan sebagai pos pengurang dari pinjaman. Pengungkapan kebijakan akuntansi, metode penyisihan pinjaman tak tertagih, pengelolaan piutang bermasalah.

Piutang merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang tercantum pada neraca. Sejumlah investasi perusahaan sebagian besar terdapat pada piutang, investasi tersebut tidak dapat ditemukan pada jenis aktiva lancar lainnya. Pemberian piutang juga menimbulkan risiko yang cukup besar di mana akan terjadi keterlambatan dalam pelunasan sehingga menimbulkan piutang menunggak, begitu juga dengan pengelolaan piutang yang ada di Koperasi.

Terkait USP Profitabilitas menurut aturan Kebijakan Akuntansi Pemerintah diantaranya, pendahuluan kebijakan akuntansi, kebijakan pelaporan keuangan, kebijakan akuntansi kas dan setara kas, kebijakan akuntansi investasi, kebijakan akuntansi piutang, kebijakan akuntansi, persediaan, kebijakan akuntansi aset tetap, kebijakan akuntansi aset lainnya, kebijakan akuntansi kewajiban/utang, kebijakan akuntansi ekuitas, kebijakan akuntansi pendapatan, kebijakan akuntansi beban, belanja, dan transfer, kebijakan akuntansi pembiayaan anggaran (SiLPA)/ Sisa kurang pembiayaan anggaran (SiKPA)/SAL, dan kebijakan akuntansi transitoris.

Setiap melakukan pinjaman pasti ada saja yang melakukan penunggakan pembayaran di luar jatuh tempo dan inilah yang menjadi salah satu alasan terjadinya piutang menunggak. Kasus yang seperti ini menjadi salah satu

risiko yang harus ditangani dengan tegas karena pinjaman yang seharusnya sudah lunas di saat jatuh tempo akan di gulirkan kembali ke kelompok lain atau kelompok baru yang ingin melakukan pinjaman.

Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dari definisi tersebut, tujuan pokok dari sistem akuntansi adalah untuk menyediakan informasi keuangan dan memudahkan manajemen dalam mengelola perusahaan. Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi, tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional akan semakin besar. Salah satu pengelolaan dalam koperasi yang perlu diperhatikan adalah sistem akuntansi piutang.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Winaya Kecamatan Ujungberung-Cinambo Jl. Cigending No. 3 Ujungberung Kota Bandung, merupakan koperasi pegawai yang berdiri sejak bulan September tahun 2003. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Winaya Kecamatan Ujungberung-Cinambo resmi berbadan hukum yaitu No. 518/BH.66 – DISKOP/2003 tanggal 17 September 2003. Koperasi ini awalnya di bentuk atas inisiatif para guru, kepala sekolah dan para pembina dan tokoh pendidikan di kecamatan ujungberung. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Winaya guna membantu perekonomian para guru di SDN 036 Ujungberung Kota Bandung. Karena anggota koperasi hanya dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (Guru), dari guru di Cinambo sampai guru di Ujungberung. Koperasi Pegawai

Republik Indonesia (KPRI) Winaya ini pembayaran dari para pegawai anggota koperasi sudah tidak dilakukan melalui pemotongan gaji, dikarenakan sekarang sudah dari setoran masing-masing anggotanya. Sudah tidak ada pemotongan dari gaji, karena gaji langsung masuk ke rekening pegawai koperasinya. Jenis koperasi yang ada di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Winaya ini hanya koperasi simpan pinjam saja.

Prosedur Peminjaman pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Winaya adalah anggota mengajukan permohonan pinjaman kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Winaya. Anggota menyampaikan rencana penggunaan dana yang dibutuhkan dan mendeskripsikan hasil usahanya secara transparan dan akuntabel. Anggota menyertakan jaminan berupa kepemilikan usaha dan pernyataan kesanggupan penyelesaian pinjaman modal usahanya. Anggota membuat pakta integritas atau MOU dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Winaya sebagai bentuk pertanggungjawaban, konsekuensi akibat usahanya, di atas materai yang berlaku. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Winaya tidak memikul kerugian anggota yang diakibatkan oleh apapun. Di kabulkannya pengajuan permodalan usaha tergantung atas kondisi keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Winaya dan pertimbangan atas penilaian prospek dari jenis serta bentuk usaha anggota.

Namun pada kenyataannya KPRI Winaya belum sepenuhnya melakukan pemisahan fungsi, yaitu fungsi kas dan fungsi akuntansi yang dilakukan oleh satu orang, sehingga keadaan ini kurang baik adanya karena belum sesuai dengan teori akuntansi atau dasar-dasar akuntansi piutang. Sistem akuntansi piutang memanglah sangat penting bagi instansi/perusahaan, terlebih lagi bagi koperasi. Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Winaya ini memiliki sistem akuntansi piutang yang cukup baik, namun ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan ketentuan sistem akuntansi piutang. Sistem akuntansi piutang ini sebenarnya adalah merupakan hal yang membahas atau mengenai fungsi yang terkait, dokumen dan catatan yang digunakan, dan prosedur yang membentuk sistem akuntansi piutang pada perusahaan/instansi dan koperasi.

Sistem Akuntansi Piutang yang diterapkan di KPRI Winaya dilihat dari fungsi kredit, fungsi penagihan, fungsi akuntansi. catatan akuntansi nya yaitu jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas, dokumen yang digunakan yaitu buku kas masuk dan buku kas keluar, metode pencatatan piutang menggunakan metode posting harian. Sistem Akuntansi Piutang tersebut belum sesuai dengan Sistem Akuntansi Piutang yang seharusnya dimana terdiri dari fungsi kredit, fungsi penagihan, fungsi kas, dan fungsi akuntansi. Dokumen yang digunakan seharusnya yaitu faktur penjualan, buku kas masuk, buku kas keluar, memo kredit, bukti memorial (Journal Voucher). Catatan akuntansi yaitu jurnal penjualan, jurnal retur penjualan, jurnal umum, jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas, kartu piutang. Metode pencatatan piutang ada posting kedalam

kartu piutang, transaksi retur penjualan, transaksi penerimaan kas dari piutang, transaksi penghapusan piutang, metode posting harian, metode posting periodik.

Pemberian piutang juga menimbulkan risiko yang cukup besar di mana akan terjadi keterlambatan dalam pelunasan sehingga menimbulkan piutang menunggak. Begitu juga dengan pengelolaan piutang yang ada di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Winaya. Adapun perkembangan data piutang menunggak pada KPRI Winaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Data Piutang KPRI Winaya

Tahun	Jumlah Piutang (Rp)	Jumlah Piutang Menunggak (Rp)	Persentase %
2016	484.000.000	71.274.000	6,80
2017	269.500.000	35.223.093	7,65
2018	393.750.000	46.860.000	8,40
2019	224.000.000	46.860.000	4,78
2020	264.150.000	36.760.000	7,18

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Neraca KPRI Winaya

Berdasarkan hasil survey pendahulu dan wawancara peneliti bahwa dapat diketahui beberapa fenomena masalah pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Winaya, yaitu menunjukkan pada tahun 2016 Jumlah Piutang mengalami fluktuasi sebesar Rp. 484.000.000, pada tahun 2017 jumlah piutang mengalami penurunan sebesar Rp. 269.500.000, pada tahun 2018 jumlah piutang mengalami fluktuasi kembali sebesar Rp. 393.750.000, pada tahun 2019

jumlah piutang mengalami penurunan kembali sebesar Rp. 224.000.000, pada tahun 2020 jumlah piutang mengalami fluktuasi sebesar Rp. 264.150.000. Lalu jumlah piutang menunggak pada tahun 2016 mengalami fluktuasi sebesar Rp. 71.274.000, pada tahun 2017 jumlah piutang menunggak mengalami penurunan sebesar Rp. 35.223.093, pada tahun 2018 dan 2019 jumlah piutang menunggak mengalami fluktuasi kembali sebesar Rp. 46.860.000, pada tahun 2020 jumlah piutang menunggak mengalami penurunan sebesar Rp. 36.760.000. Jika dibandingkan dari hasil perhitungan pada tabel 1.1 menunjukkan persentase jumlah piutang dengan jumlah piutang menunggak pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 6,80%, pada tahun 2017 mengalami fluktuasi sebesar 7,65% pada tahun 2018 mengalami fluktuasi kembali sebesar 8,40, pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 4,78%, pada tahun 2020 mengalami fluktuasi sebesar 7,18%.

Dilihat dari perkembangan piutang menunggak periode tahun 2016-2020 Pada KPRI Winaya terjadi karena kurangnya pemahaman tentang sistem akuntansi piutang nya dan juga perlu penambahan satu karyawan yang berkompeten dalam bidang keuangan yang nantinya akan dijadikan pengurus untuk mengisi atau menangani tentang catatan akuntansinya agar dapat membantu kelancaran kegiatan operasional koperasinya.

KPRI Winaya tidak melakukan atau menerapkan Sistem Akuntansi Piutang maka KPRI Winaya dalam pencatatan, perhitungan, atau penyajian piutang nya tidak wajar karea tidak menggunakan sistem akuntansi piutang yang sudah disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku.

Hasil penelitian sebelumnya yang dapat menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Piutang dalam Meningkatkan Penerimaan Kas pada CU. Bina Kasih Pematangsiantar menurut penelitian sebelumnya Wico J Tarigan, (2020) menyimpulkan bahwa dalam Penerapan Sistem Akuntansi Piutang dalam Meningkatkan Penerimaan Kas pada dasarnya penagihan piutang pada CU. Bina Kasih sudah menerapkan sistem akuntansi, namun masih ada sistem yang digunakan belum memberikan keamanan tagihan. Setelah menerima piutang dari anggota CU. Bina Kasih melakukan pencatatan penerimaan kas kedalam jurnal. Pencatatan yang dilakukan adalah menggunakan komputerisasi.

Menurut Yulyana Fauziah (2016) dapat menunjukan bahwa Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Piutang untuk Menilai Pengendalian Intern pada Koperasi Wanita Sejahtera menyimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini yang dilakukan Yulyana pada Koperasi Wanita Sejahtera Desa Gayam – Kecamatan Gurah, Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi piutang pada Koperasi Wanita Sejahtera desa Gayam adalah buku kas, buku piutang, buku rekapitulasi kas bulanan, neraca lajur, dan neraca. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi piutang pada Koperasi Wanita Sejahtera desa Gayam adalah surat permohonan pinjaman, buku simpan pinjam anggota, slip penyetoran, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar.

Menurut Deni Alfiansyah (2019) dapat menunjukan bahwa Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Piutang Usaha pada Bapel JPKM Surya Sumirat Menggunakan PHP MySQL menyimpulkan bahwa hasil dari

penelitian ini sudah memiliki sistem namun belum ada sistem informasi akuntansi mengenai penagihan piutang usaha. Dengan sistem informasi akuntansi piutang usaha ini dapat mempermudah Badan Penyelenggara (Bapel) Jaminan Pemelihara Kesehatan Masyarakat (JPKM) Surya Sumirat dalam membuat Laporan Posisi Keuangan efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Sistem Akuntansi Piutang Dalam Upaya Merancang Sistem Akuntansi Piutang Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Winaya Kota Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Winaya dalam Merancang Sistem Akuntansi Piutang.
2. Bagaimana Merancang Sistem Akuntansi Piutang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Winaya.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang penulis lakukan untuk memperoleh data-data dan informasi atau keterangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti serta memberikan gambaran mengenai Evaluasi Sistem Akuntansi Piutang dalam upaya Merancang Sistem Akuntansi Piutang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Winaya Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Winaya dalam Merancang Sistem Akuntansi Piutang.
2. Untuk memberi masukan bagaimana Merancang Sistem Akuntansi Piutang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Winaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, wawasan, pengetahuan serta informasi yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut atau penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah mengenai evaluasi sistem akuntansi piutang dalam upaya merancang sistem akuntansi piutang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Winaya Kota Bandung, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan praktis kepada berbagai pihak tersebut diantaranya bagi:

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan penulis dapat memahami mengenai Evaluasi Sistem Akuntansi Piutang dalam Upaya Merancang Sistem Akuntansi Piutang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Winaya Kota Bandung.

2. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai Evaluasi Sistem Akuntansi Piutang dalam Upaya Merancang Sistem Akuntansi Piutang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Winaya Kota Bandung, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

3. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Winaya

Bagi Koperasi Winaya diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan atau evaluasi dalam kinerja koperasi dimasa yang akan datang agar Koperasi Winaya dapat menjadi koperasi yang berkembang dan semakin baik.

4. Institut Manajemen Koperasi Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan referensi kepustakaan yang ada di perpustakaan Institut Manajemen Koperasi Indonesia untuk penelitian lebih lanjut bagi pihak-pihak yang membutuhkan, dan semoga bisa bermanfaat bagi semua orang.